

PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN BERBASIS HASIL RESKORING DI KABUPATEN TORAJA UTARA

Oleh : Daud Malamassam¹⁾

ABSTRAK

Kabupaten Toraja Utara merupakan kabupaten baru, hasil pemekaran Kabupaten Tana Toraja, pada tahun 2008. Sebagai kabupaten yang baru, pemerintah dan masyarakat di wilayah ini dituntut untuk dapat meningkatkan intensitas, kuantitas dan kualitas layanan bagi warganya, melalui optimalisasi pendayagunaan semua sumberdaya yang dimilikinya. Kabupaten ini perlu memacu pembangunan berbagai fasilitas sosial dan peningkatan aksesibilitas semua bagian wilayah, untuk mengejar ketertinggalannya dari kabupaten lain.

Salah satu langkah awal yang perlu dilakukan untuk itu adalah identifikasi dan inventarisasi secara akurat potensi sumberdaya alam yang dimiliki. Kabupaten ini tercatat memiliki sumberdaya hutan, yang keseluruhannya merupakan hutan lindung, sehingga tidak dapat diharapkan untuk menghasilkan kayu yang merupakan salah satu kebutuhan vital masyarakat, khususnya untuk kepentingan pembangunan TONGKONAN (rumah adat). Bertolak dari kondisi di atas maka dinilai perlu untuk meneliti kemungkinan mengubah fungsi sebagian dari kawasan hutan lindung yang ada di wilayah ini menjadi hutan produksi, melalui rescoring faktor-faktor yang menjadi dasar dalam penentuan peruntukan / fungsi kawasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat seluas 6.251 ha kawasan hutan lindung yang dapat mengalami perubahan fungsi. Selain itu terdapat pula seluas 2.134 ha yang memiliki potensi khusus (kandungan mineral). Sebagian dari bagian kawasan yang termaksud terakhir ini berpenutupan semak belukar, sehingga dapat dipertimbangkan untuk terlebih dahulu diolah dan dimanfaatkan bahan mineralnya sebelum melakukan kegiatan pembangunan kembali hutan yang bersangkutan.

Kata Kunci : Hutan lindung, Rescoring, Perubahan fungsi

PENDAHULUAN

Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu kabupaten baru, hasil pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Kabupaten dengan ibukota Rantepao ini, terbentuk berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2008, yang dimaksudkan untuk lebih mempercepat upaya-upaya peningkatan intensitas, kuantitas dan kualitas layanan bagi warganya, melalui optimalisasi pendayagunaan sumberdaya yang dimilikinya, dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan.

Program-program pembangunan pada daerah otonom baru hasil pemekaran, yang umumnya jauh dari pusat pemerintahan dengan sejumlah keterbatasan, peran sektor primer (sumber daya alam) masih tetap menjadi andalan, dalam rangka mengejar ketertinggalannya pada hampir semua aspek pembangunan. Untuk itu, diperlukan adanya pengkajian secara mendalam tentang potensi sektor primer yang dimiliki, untuk melandasi penyusunan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, sesuai dengan kondisi aktual yang telah dicapai dan potensi pengembangan yang dimiliki, serta peluang-peluang yang ditawarkan oleh lingkungan eksternal.

Selaku daerah otonom yang baru, Kabupaten Toraja Utara dituntut untuk dapat mengenali, menggali dan mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang dimilikinya, untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya secara cepat

dan tepat. Untuk kepentingan termaksud sektor-sektor yang berbasis sumberdaya alam / lahan, seperti sektor pertanian dalam arti luas, menjadi andalan utama dalam rangka peletakan dasar yang kokoh bagi pembangunan kabupaten.

Kabupaten Toraja Utara tercatat memiliki kawasan hutan seluas 51.785 ha (41,73%), yang seluruhnya merupakan hutan lindung. Saat ini sebagian dari kawasan hutan lindung termaksud telah berubah menjadi semak belukar dan malahan ada yang sudah menjadi tempat pemukiman. Perubahan fungsi sebagian kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi, perlu dipertimbangkan khususnya pada bagian-bagian yang tidak lagi berpenutupan hutan dan berdekatan atau sudah menjadi lokasi pemukiman. Pengubahan fungsi ini diharapkan dan mendorong terselenggaranya pembangunan hutan yang lebih berbasis sumberdaya masyarakat.

Selain itu, perubahan sebagian kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi di Kabupaten Toraja Utara memang merupakan sebuah kebutuhan mengingat “*TONGKONAN*” (rumah adat) di wilayah ini sangat memerlukan hasil hutan sebagai bahan bangunan utama. Dan malahan seluruh bahan bangunan rumah adat ini terdiri atas hasil hutan berupa kayu dan bambu.

Patut dicatat bahwa pengubahan fungsi hutan termaksud harus memiliki dasar yang obyektif dan pemanfaatan atau penggunaan paska pengalihan fungsi harus dilakukan secara terencana, dengan

1) Guru Besar Fakultas Kehutanan Unhas

tetap beorientasi pada optimalisasi fungsi sumberdaya, serta adanya jaminan bagi pemulihan dan pelestarian kesehatan ekosistem wilayah, baik di wilayah kabupaten maupun pada wilayah Daerah Aliran Sungai yang berhulu pada wilayah kabupaten yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

A. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan, mulai dari bulan Juni sampai Desember 2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penafsiran peta citra satelit dan peta-peta tematis untuk memperoleh gambaran tentang luas wilayah kabupaten beserta perinciannya menurut karakteristik lahan / bagian wilayah. Peta citra secara khusus Khusus digunakan untuk memperoleh data mengenai penutupan lahan.

B. Metode Analisis

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa kawasan hutan di wilayah Kabupaten Toraja Utara secara keseluruhan merupakan hutan lindung, sementara wilayah ini sangat membutuhkan hasil hutan yang seharusnya diperoleh dari kawasan hutan produksi. Sehubungan dengan itu, dinilai penting untuk mengkaji adanya kemungkinan untuk mengalih-fungsikan sebagian kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi.

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yang didasarkan atas hasil *rescoring* terhadap intensitas (erosivitas) curah hujan, erodibilitas tanah dan topografi. Nilai-nilai yang digunakan untuk *rescoring* adalah seperti yang tertera pada Lampiran 1. Bagian kawasan tertentu dengan total nilai skor ≥ 175 harus tetap dipertahankan sebagai kawasan lindung, sedang bagian kawasan dengan skor yang kurang dari 175 dapat dipertimbangkan untuk dialih-fungsikan menjadi kawasan hutan produksi.

Selain hasil *rescoring*, kondisi penutupan lahan dan adanya potensi-potensi khusus pada suatu bagian wilayah hutan dapat pula menjadi pertimbangan dalam penetapan alihfungsi, baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat permanen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Biofisik Wilayah

Kabupaten Toraja Utara meliputi wilayah seluas 124.098 ha yang terdiri atas Kawasan Hutan lindung seluas 51.785 ha (41,73%), wilayah non hutan (Areal Peruntukan Lain) seluas 72.227 ha (58,20%), dan sisanya seluas 87 ha merupakan

Tubuh Air. Berdasarkan hasil penafsiran citra satelit, kondisi penutupan wilayah saat ini didominasi penutupan Pertanian Lahan Kering campur Semak, yaitu seluas 54.875 ha (44,22%), dan bentuk penutupan pada urutan kedua berupa hutan sekunder dengan luas sebesar 30.548 ha (24,62 %). Perincian luas bentuk penutupan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1. Hal yang paling mencolok yang diperlihatkan oleh kondisi penutupan ini ialah bahwa areal pertanian lahan kering campur semak bersama semak belukar yang merupakan lahan-lahan yang tidak / kurang produktif lebih luas dari pada kawasan hutan.

Tabel 1. Perincian luas wilayah kabupaten berdasarkan bentuk penutupan lahannya

Kelas Lereng	Luas	
	ha	%
Hutan Primer	7.951	6,41
Hutan Sekunder	30.548	24,62
Hutan Tanaman	1.9	-
Pert. lahan kering	1.002	0,81
Plk campur semak	54.875	44,22
Padang rumput	2.540	2,05
Semak belukar	16.354	13,18
Pemukiman	170	0,14
Sawah	10.506	8,47
Tubuh air	91	0,07
Blank	60	0,05
Jumlah	124.098	100,00

Dari aspek tofografi, wilayah Kabupaten Toraja Utara didominasi oleh bagian wilayah dengan kemiringan lereng 15 – 40 %, yaitu total luas sebesar 67.232 ha (54,18%). Bagian wilayah dengan kemiringan lereng kurang dari 15% hanya seluas 36.869 ha (29,71%), dan sisanya seluas 19.997 ha (16,11%) memiliki kemiringan lereng di atas 40 %. Perincian luas wilayah menurut kemiringan lereng dapat dilihat pada Tabel 2.

Informasi lain tentang kondisi fisik wilayah Kabupaten Toraja Utara, yaitu kondisi iklim (curah hujan) dan kondisi tanah (jenis tanah) masing-masing disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4. Angka-angka pada Tabel 3 menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Toraja Utara didominasi oleh bagian wilayah dengan curah hujan di atas 3600 mm per tahun, dan malahan terdapat bagian wilayah yang curah hujan tahunannya mencapai 3.700 mm dan bahkan lebih dari 4300 mm. Hanya seluas 5.220 ha (4,10%) bagian wilayah kabupaten ya000 mm per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh wilayah Kabupaten Toraja Utara tergolong beriklim basah.

Tabel 2. Perincian luas wilayah kabupaten berdasarkan kelas lerengnya

Kelas Lereng	Luas	
	ha	%
0 – 8	13.338	10,75
8 – 15	23.531	18,96
15 – 25	36.420	29,35
25 – 40	30.812	24,83
> 40	19.997	16,11
Jumlah	124.098	100,00

Tabel 3. Perincian luas wilayah kabupaten berdasarkan curah hujannya

Curah hujan (mm/tahun)	Luas	
	ha	%
2.417	3.121	2,51
2.889	2.099	1,69
3.608	50.394	40,61
3.645	22.089	17,80
3.700	3.219	2,59
3.768	37.914	30,55
4.307	5.262	4,24
Jumlah	124.098	100,00

Menyangkut jenis tanah, wilayah Kabupaten Toraja Utara didominasi oleh jenis tanah Distropt atau Inseptisols, yang menempati bagian wilayah seluas 80.547 ha (64,91 %). Jenis ini merupakan jenis tanah yang perkembangannya baru pada tahap awal (*inceptum*). Tanah ini mempunyai kejenuhan basa kurang dari 50% dan umumnya menunjukkan reaksi masam. Struktur tanahnya gumpal dengan ratio liat-debu 1 : 10. Akumulasi aluminium di lapisan bawah pada kisaran kedalaman 50-100 cm merupakan kendala bagi kegiatan budidaya. Hal ini yang menyebabkan banyaknya areal yang semula dibuka dan diusahakan oleh masyarakat, dalam perkembangannya diterlantarkan begitu saja oleh pemiliknya, dan pada akhirnya berubah menjadi semak belukar yang sama sekali tidak produktif dan juga tidak dapat berfungsi lindung secara optimum.

Tabel 4. Perincian luas wilayah kabupaten berdasarkan jenis tanahnya

Jenis Tanah	Luas	
	ha	%
Dystropepts	80.547	64,91
Eutrandopts	8.343	6,72
Eutropepts	14.076	11,34
Rendolls	1.251	1,01
Tropaquepts	2.321	1,87
Tropudults	17.561	14,15
Jumlah	124.098	100,00

B. Hasil Reskoring dan Identifikasi Potensi Khusus Bagian Wilayah

Hasil reskoring memperlihatkan bahwa sekitar 6.251 ha kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Tana Toraja dapat dikonversi menjadi hutan Produksi, baik untuk hutan produksi terbatas (3.069 ha) maupun untuk hutan produksi biasa (2.102 ha). Sebaliknya 47.927 ha kawasan non hutan (Areal Peruntukan lain) seharusnya dikelola sebagai kawasan lindung dan kawasan penyangga, masing-masing seluas 19.406 ha dan 28.521 ha. Perincian luas tentang hasil reskoring tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.

Pengelolaan kawasan non hutan sebagai kawasan lindung dan juga sebagai kawasan penyangga akan dapat meningkatkan peranan wilayah kabupaten sebagai penyangga ekosistem disepanjang aliran sungai yang air bakunya bersumber dari wilayah Kabupaten Toraja Utara. Pembangunan dan atau pengelolaan kawasan non hutan pada bagian yang dimaksudkan ini melalui penanaman jenis-jenis pepohonan justru akan melipatgandakan fungsi lindung wilayah, meskipun sebagian dari kawasan hutan lindung tersebut dialihfungsikan menjadi hutan produksi. Hal di atas ini dengan mudah dipahami karena luas kawasan non hutan yang dapat dibangun menjadi areal yang bervegetasi pepohonan jauh lebih luas dari pada bagian kawasan hutan yang dialihfungsikan menjadi hutan produksi (47.927 ha berbanding 6.251 ha).

Bagian terbesar dari kawasan hutan yang berdasarkan hasil reskoring dapat diusulkan untuk perubahan fungsi berada di Kecamatan Baruppu, yaitu seluas 2.376 ha, kemudian secara berurutan disusul oleh Kecamatan Rantebua seluas 1.939 ha, Kecamatan Nanggal seluas 941 ha dan Kecamatan Sa'dan seluas 730 ha. Patut dicatat bahwa perubahan fungsi termaksud harus sesegera mungkin diikuti dengan kegiatan penanaman setelah terlebih dahulu menentukan jenis yang sesuai dengan kondisi agroklimat setempat. Perincian secara lebih lengkap dari keseluruhan lokasi yang berdasarkan hasil reskoring dapat diubah menjadi hutan produksi dapat dilihat pada Tabel 6.

Selain lokasi-lokasi atau bagian wilayah yang telah dikemukakan di atas terdapat pula bagian wilayah atau lokasi yang memiliki potensi cadangan mineral yang dilaporkan cukup potensial. Total luas dari lokasi ini adalah 2.134 ha dengan perincian 1.446 ha berada di Kecamatan Buntu Pepasan dan masing-masing seluas 198 ha dan 36 ha berada di Kecamatan Sa'dan dan Kecamatan Rindingallo.

Tabel 5. Matriks Fungsi Kawasan menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan dan Arahan Peruntukan Kawasan berdasarkan Hasil Rescoring

Fungsi Kawasan	Kawasan Budidaya	Kawasan Peyangga	Kawasan Lindung	Perairan	Jumlah (ha)
APL	24.300	28.521	19.406	-	72.227
HL	2.102	3.069	46.614	-	51.785
Perairan	53	31	-	3,4	87
Jumlah (ha)	26.455	31.621	66.020	3,4	124.099

Tabel 6. Perincian luas kawasan hutan yang dapat dialihfungsikan berdasarkan hasil rescoring

Kecamatan	Luas	
	ha	%
Balusu	6	0,96
Bangkelekila	6	0,96
Baruppu	2.376	38,01
Buntao	64	1,02
Buntu Pepasan	105	1,68
Nanggala	941	15,05
Rantebua	1.939	31,02
Sa'dan	730	11,68
Sesean Suloara'	84	1,34
Jumlah	6.251	100,00

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bagian kawasan hutan lindung yang ada di Kabupaten Toraja Utara yang dapat dialihfungsikan menjadi hutan produksi terbatas adalah seluas 6.251 ha. Selain itu terdapat pula bagian kawasan seluas 2.134 ha yang memiliki cadangan mineral yang cukup bernilai ekonomi, yang sebagian diantaranya berpenutupan semak belukar, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diolah bahan tambangnya sebelum dibangun kembali menjadi hutan yang berfungsi produksi ataupun hutan yang berfungsi lindung.
2. Perubahan fungsi hutan lindung di Kabupaten Toraja Utara diharapkan tidak akan mengurangi peranan sumberdaya hutan setempat untuk kepentingan-kepentingan yang lebih luas. Perubahan fungsi termaksud malahan diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi pemerintah daerah bersama masyarakatnya untuk dapat mengandalkan pendayagunaan potensi sumberdaya alamnya secara optimal dalam rangka mendukung program pembangunan wilayah pada berbagai bidang dan atau sektor.

3. Perubahan fungsi kawasan hutan di Kabupaten Toraja Utara akan memungkinkan potensi yang terdapat di dalam kawasan hutan tersebut dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan vital masyarakat setempat, khususnya untuk pembangunan dan pelestarian Tongkonan.

B. Saran

1. Pengalih-fungsian sebagian kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi di Kabupaten Toraja Utara perlu didahului dengan analisis kesesuaian lahan untuk menentukan jenis yang paling sesuai dikembangkan pada lokasi-lokasi yang bersangkutan.
2. Preskripsi manajemen yang akan diterapkan dalam pengelolaan hutan paska alih-fungsi harus tetap memperhatikan fungsi lindung wilayah dan kelestarian ekosistem secara keseluruhan

DAFTAR PUSTAKA

- Davis L.S., Johnson K.N., Bettinger P.S., and Howard T.E. 2001. *Forest Management to Sustain Ecological, Economic and Social Value*. Fourth Edition. McGraw-Hill Companies. New York.
- Departemen Kehutanan, 1992. Manual Kehutanan. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Dirjen Kehutanan, 1978. Vadamekum Kehutanan Indonesia. Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian. Jakarta.
- Malamassam, D., Iswara Gautama, S. A. Paembonan, dan A. S. Soma, 2012. Pengembangan Model Pengelolaan Hutan Multifungsi di Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin.
- , 2006. *Glosarry Pengelolaan DAS*. Badan Litbang Kehutanan. Balai Litbang Teknologi Pengelolaan Indonesia Bagian Timur. Makassar.
- Simon, H., 2010. Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Hutan. Timber Management. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Lampiran 1. Nilai Skor untuk kemiringan lereng, erodibilitas tanah dan intensitas curah hujan

Kelas lereng		Erodibilitas ErosiTanah			Intensitas curah hujan	
%	Skor	Jenis Tanah	Kategori	Skor	mm/jam	Skor
0 – 8	20	Aluvial, tanah glei, planosol, hidromorf kelabu, laterik air tanah	Tidak Peka	15	< 13,6	10
8 – 15	40	L a t o s o l	Kurang Peka	30	13,6 – 20,7	20
15 – 25	60	Brown Forest Soil, Non Calcic brown, mediteran	Agak Peka	45	20,7 – 27,7	30
25 – 45%	80	Andosol, laterik, grumosol, podsil, podsolic	Peka	60	27,7 – 34,8	40
> 45%	100	Regosol, Litosol, Atgonosol, Renzine	Sangat Peka	75	> 34,8	50

Lampiran 2. Peta Fungsi Kawasan dan bagian kawasan yang diusulkan untuk perubahan fungsi dari Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Toraja Utara

